

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kompeni Belanda berkuasa di sebagian besar kerajaan di Nusantara. Banten pada akhir abad ke-18, sultan statusnya tidak lebih dari pegawainya saja. Melalui tangan sultan, kompeni dapat memerintahkan apa saja kepada rakyat, dalam hal perdagangan, penjualan, penanaman, hingga pembangunan.<sup>1</sup>

Pengaruh Belanda dari bidang politik makin kuat karena intervensi yang intensif dalam persoalan-persoalan intern negara-negara, misalnya dalam soal pergantian tahta, pengangkatan pejabat-pejabat birokrasi, maupun partisipasinya dalam menentukan kebijakan politik negara. Bidang sosial-ekonomi, kontak dengan Barat berakibat makin lemahnya kedudukan kepala-kepala daerah dalam negara-negara tradisional.<sup>2</sup> Kekuasaan mereka berangsur-angsur berkurang dan lebih jauh ditempatkan di bawah pengawasan pejabat-pejabat asing, sedang tenaga kerja mereka dilibatkan dalam sistem eksploitasi ekonomi kolonial. Sudah pasti keadaan seperti ini sedikit banyak menimbulkan keguncangan dalam kehidupan para penguasa dalam negara-negara tersebut, diatur menurut sistem kolonial, misalnya

---

<sup>1</sup> Halwany Michrob, *Catatan Masalalu Banten*, (Serang: Penerbit Saudara Serang, 2011), p. 180.

<sup>2</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV Kemunculan Penjajahan di Indonesia*, p. 152.

diharuskan menyumbangkan tenaga kerjanya secara paksa pada penguasa kolonial.<sup>3</sup>

Hubungan antara penguasa pemerintah kolonial dengan pemerintah pribumi memiliki perbedaan yang cukup mencolok, kedudukan sultan sebagai penguasa tradisional di daerah digunakan oleh pemerintah kolonial sebagai perantara pemerintah kolonial dengan masyarakat pribumi dalam pelaksanaan eksploitasinya. Sultan sebagai pemimpin tradisional memiliki kekuatan yang lumayan kuat karena kepemimpinannya berakar pada struktur sosial yang didasarkan pada unsur kelahiran, kekayaan, dan status sosial.<sup>4</sup>

Perubahan sosial akibat pengaruh Barat yang semakin kuat merupakan suatu periode pergolakan sosial pada abad ke-19. Orang dapat menyaksikan suatu modernitas ditandai oleh permasalahan sosial yang silih berganti dan yang menyerupai konflik dan pemberontakan. Kesultanan Banten yang didirikan pada tahun 1520 oleh pendatang-pendatang dari Kerajaan Demak di Jawa. Banten mempunyai banyak pelabuhan kecil, diantaranya adalah Anyer.<sup>5</sup>

Pulau Jawa mengalami pergantian pimpinan dari Pemerintah Gubernur Jenderal Albertus Henricus Wiese

---

<sup>3</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia IV Kemunculan Penjajahan di Indonesia*, p. 152.

<sup>4</sup> Pramoedya Ananta Toer, *Jalan Raya Pos, Jalan Daendels*, (Jakarta: Lentera Dipantara, 2005), p. 88.

<sup>5</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya Sebuah Studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2015), p. 13-54.

digantikan oleh Herman Willem Daendels pada tanggal 14 Januari 1808. Penguasa baru ini menerima instruksi dari Raja Belanda Lodewijk (Louis) Napoleon untuk mempertahankan Pulau Jawa terhadap serbuan Inggris yang saat itu sudah melakukan blokade di Laut Jawa. Sebagai pelaksanaan instruksi tersebut, setelah dilantik menjadi Gubernur Jenderal, Daendels memantau wilayah Jawa demi kepentingan pertahanan. Hasil analisis lapangan, Pulau Jawa harus berada di bawah kendali Gubernur Jenderal secara langsung dan terstruktur.<sup>6</sup>

Daendels menerima dua tugas utama dari Louis Napoleon Bonaparte adik dari Napoleon Bonaparte, Kaisar Perancis. Dua tugas utama itu diberikan pada Daendels, sebelum ia berangkat ke Jawa dari Belanda. Tugas pertama yaitu harus mempertahankan Pulau Jawa agar tidak jatuh dan ditaklukkan Inggris. Hal ini merupakan turunan dari konflik yang sedang berlangsung di Eropa yang menentang Perancis. Tugas kedua adalah melakukan perbaikan sistem administrasi negara jajahan di Jawa. Hal tersebut penting dilakukan mengingat evaluasi atas hancurnya VOC dikarenakan mengatur organisasi yang korupsi dan kacau sehingga perlu dirombak sampai akar-akarnya.<sup>7</sup>

Daendels berkuasa dari tahun 1808-1811 setelah Negeri Belanda menjadi sebuah Kerajaan Kekaisaran Prancis, di bawah

---

<sup>6</sup> Michrob, *Catatan Masalalu Banten*, p. 183.

<sup>7</sup> Faizal Arifin, "Hegemoni Terhadap Kekuasaan Di Nusantara: Strategi Politik Daendels Meruntuhkan Kesultanan Banten Tahun 1808-1811", *Riyadul Ulum: Jurnal Agastya*, Vol.11 No.1 (Januari2021), p. 5-6.

pimpinan Napoleon Bonaparte. Ia pun tampil ditanah jajahan dengan membawa semangat revolusi Prancis. Daendels melakukan perubahan dalam bidang pemerintahan yang berkaitan dengan administrasi wilayah, dan kekuasaan elit politik pribumi (sultan dan bupati). Daendels membagi dua Pulau Jawa ke atas sembilan *prefektur* (Provinsi). Setiap provinsi dipimpin oleh satu pemimpin tunggal. Istilah ini kemudian diubah menjadi *landdrostambt* (keresidenan). Sementara itu, istilah Kesultanan masih diberlakukan untuk Banten dan Cirebon dan wilayah Priangan (*westerlanden*), Kesultanan Banten, Priangan (*Westerlanden*) waktu itu terbagi atas Jakarta dan daerah sekitarnya (Bogor, Tangerang, dan Karawang) Kesultanan Banten, Priangan, (Cianjur, Bandung, Sumedang dan Parakan Munang), Kesultanan Cirebon mencakup Limbangan, Sukapura, dan Galuh.<sup>8</sup>

Daendels menjalankan pemerintahan yang bersifat sentralistis. Semua urusan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan, baik pemerintahan pusat dengan instruksi dari Gubernur Jenderal. Daendels ingin menjalankan pemerintahan secara langsung *direct rule* (pemerintahan langsung) tanpa perantara sultan atau bupati. Sejalan dengan hal tersebut, Daendels melakukan birokrasi di kalangan pemerintahan

---

<sup>8</sup> Nina H. Lubis dkk, *Sejarah Banten, Membangun Tradisi dan Peradaban*, (Badan Perpustakaan dan arsip Daerah Provinsi Banten, 2014), p. 187.

tradisional, para sultan dan bupati dijadikan pegawai pemerintah yang menerima gaji, di bawah pengawasan *prefek* (pejabat).<sup>9</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, Daendels melakukan birokratisasi di kalangan pemerintahan tradisional, para sultan dan bupati dijadikan pegawai pemerintah yang menerima gaji, di bawah pengawasan *prefek*. Sistem pergantian sultan dan bupati secara turun temurun tidak diakui, dan diganti dengan sistem penunjukkan. Kekuasaan mereka pun berangsur-angsur dikurangi. Untuk mempertahankan Pulau Jawa, Daendels menghadapi kekurangan personil militer, bahkan pemerintah Hindia Belanda waktu itu tidak memiliki angkatan laut. Oleh karena itu, para bupati pun dilibatkan dalam politik militer Daendels. Gelar bupati ditentukan korelasinya dengan kepangkatan militer. Bupati bergelar *tumenggung* mendapat pangkat mayor, bupati bergelar *adipati/aria* disamakan dengan letnan kolonel, dan bupati bergelar *pangeran* diberi pangkat kolonel. Penyetaraan kepangkatan seperti ini juga dimaksudkan untuk kemudahan skala penggajian.<sup>10</sup>

Sesuai instruksi Raja Lodewijk harus dibuat pangkalan armada di ujung barat dan ujung timur untuk menampung kapal-kapal perang yang berada di Jawa. Keduanya dimaksudkan untuk melindungi Jawa dari ancaman invasi di ujung barat dan ujung timur. Kedua pangkalan armada ini akan dihubungkan dengan

---

<sup>9</sup>Laporan Jurnalistik Kompas, *Ekspedisi Anjer-Panaroekan*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), p. 14.

<sup>10</sup> Nina H. Lubis, *Banten Dalam Pergumulan Sejarah*, (Jakarta: LP3ES, 2004), p.176.

jalan raya. Berdasarkan pertimbangan di atas, Daendels menetapkan perlunya pertahanan pantai yang kuat, pilihan itu jatuh pada Teluk Meeuwen di Selat Sunda (Ujung Kulon) dan Selat Manari di Gresik.<sup>11</sup>Tidak hanya perbaikan jalan di Banten, tapi terutama pembangunan pelabuhan berbenteng di Meeuwen, jalan Sunda. Banyak buruh dan juga banyak korban.<sup>12</sup> Kebijakan Daendels di bidang politik dan pertahanan membawa dampak yang luas dan benturan dengan elite pribumi, khususnya di Banten..<sup>13</sup>

Respon Mangkubumi Wargadireja terhadap kebijakan Daendels, pada awalnya ia ragu untuk menyetujui apa yang diperintahkan Daendels dan ia meminta izin kepada Sultan Banten yaitu Sultan Abunasar Muhammad Ishak Zainul Muttaqien untuk menyediakan pekerja, namun ternyata sesuai prediksi Mangkubumi Wargadireja bahwa para pekerja ini mendapatkan banyak kendala ketika harus memabat hutan, menimbun rawa, meratakan tanah tinggi agar menjadi datar untuk mencipatakan lahan yang terbuka. Hutan yang sangat lebat dan berawa-rawa yang tidak pernah terkena sinar matahari menimbulkan bau busuk. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan hampir semua tenaga

---

<sup>11</sup>Djoko Marihandono dan Harto Juwono, *Perlawanan Rakyat Banten Melawan Imperialisme Kepahlawanan Pangeran Mangkubumi Wargadireja*,(Serang; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata provinsi Banten KP3B, 2014), p. 1-2.

<sup>12</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pemberontakan Petani Banten 1888 Kondisi, Jalan Peristiwa, dan Kelanjutannya Sebuah studi Kasus Mengenai Gerakan Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2015), p. 2.

<sup>13</sup> Marihandono, *Perlawanan Rakyat Banten Melawan Imperialisme Kepahlawanan Pangeran Mangkubumi Wargadireja*, p. 85-86.

kerja (rakyat Banten) terserang penyakit tulang, hingga mengalami kelumpuhan, dan mengakibatkan kematian. Banyaknya korban yang meninggal menyebabkan rakyat Banten takut sehingga banyak yang melarikan diri, dengan upaya yang keras, Wargadireja meyakinkan penduduk bersama Bangsawan Banten lainnya.<sup>14</sup>

Tindakan awal yang dilakukan Mangkubumi Wargadireja adalah mencoba mengumpulkan tenaga kerja sebanyak yang dikehendaki oleh Daendels. Untuk mengurangi tenaga kerja yang dikenakan kerja wajib, Mangkubumi Wargadireja berusaha memberikan laporan setiap hari kepada Daendels tentang jumlah penduduk yang meninggal karena kerja wajib ini. Namun, Daendels tetap bersikeras untuk membangun pangkalan armada di Teluk Meeuwen ini, akhirnya Wargadireja melaporkan kondisi ini kepada Sultan Ishak. Mendengar laporan dari Mangkubumi Wargadireja, sultan mengirimkan dua utusan ke Batavia untuk melaporkan kepada Gubernur Jenderal Daendels dengan di kawal oleh Komandan Militer Banten Phiter Philip Du Puy. Misi utusan ini adalah permohonan agar penduduk dibebaskan dari penyetoran tenaga pembangunan pangkalan armada laut di Teluk Meeuwen.<sup>15</sup>

Daendels pada saat kedatangan kedua utusan dari Sultan Banten menolak permohonan untuk penangguhan atau

---

<sup>14</sup> Marihandono, *Perlawanan Rakyat Banten Melawan Imperialisme Kepahlawanan Pangeran Mangkubumi Wargadireja*, p. 70.

<sup>15</sup> Marihandono, *Perlawanan Rakyat Banten Melawan Imperialisme Kepahlawanan Pangeran Mangkubumi Wargadireja*, p. 71.

pengurangan tenaga kerja wajib. Ia bahkan memerintahkan kepada utusan itu agar disampaikan kepada sultan untuk tetap meneruskan proyek pembangunan pangkalan armaa perang di Teeluk Meeuwen. Bahkan Gubernur Jenderal juga meminta kepada Sultan Bantn agar menyewakan tanah di wilayah timur Banten.<sup>16</sup>

Hal tersebut memunculkan reaksi kemarahan dari rakyat Banten dan juga Pemerintahan Kesultanan Banten. Seperti yang sudah dipaparkan di atas mengenai latar belakang terjadinya, penulis merasa sungguh sangat disayangkan jika masyarakat, khususnya masyarakat Banten tidak mengetahui tentang sejarah tokoh Kesultanan Banten, yaitu Mangkubumi Wargadireja, karena berani mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap tuntutan yang di tuntutan Daendels, karena merugikan rakyat Banten, terutama rakyat Banten Selatan. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang masalah ini penulis ingin berkontribusi dengan mengambil judul tentang “Konflik Mangkubumi Wargadireja dengan Daendels dalam Pembangunan Pangkalan Armada Perang di Teluk Meeuwen Tahun 1808”, dengan menelusuri kisah peristiwa tersebut dengan cara memfokuskan dari segi historis pada awal abad ke-19.

---

<sup>16</sup> Marihandono, *Perlawanan Rakyat Banten Melawan Imperialisme Kepahlawanan Pangeran Mangkubumi Wargadireja*, p. 72.



## **B. Rumusan Masalah**

Latar belakang masalah di atas, dapat beberapa poin-poin yang perlu diteliti mengenai “Konflik Mangkubumi Wargadireja dengan Daendels dalam Pembangunan Pangkalan Armada Perang di Teluk Meeuwen Tahun 1808”. Pada rumusan masalah ini dapat disebutkan, berikut ini adalah poin-poin yang bisa diteliti, diantaranya adalah :

1. Bagaimana Biografi Mangkubumi Wargadireja?
2. Bagaimana Pembangunan Pangkalan Armada Perang di Teluk Meeuwen?
3. Bagaimana Konflik Mangkubumi Wargadireja terhadap Daendels dalam Pembangunan Pangkalan Armada perang di Teluk Meeuwen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Mengacu pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Biografi Mangkubumi Wargadireja.
2. Untuk mengetahui Pembangunan Pangkalan Armada Perang di Teluk Meeuwen.
3. Untuk mengetahui Konflik Mangkubumi Wargadireja terhadap Daendels dalam Pembangunan Pangkalan Armada perang di Teluk Meeuwen.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Perlawanan dipandang sebagai cara mempertahankan atau memperjuangkan suatu keyakinan dengan gigih, bisa juga

dipahami reaksi atau penolakan terhadap sesuatu yang tidak dikehendaki.<sup>17</sup> Salah seorang tokoh yang menjadi pelopor perlawanan terhadap Daendels (Kolonial Belanda) adalah Mangkubumi Wargadireja. Ia adalah seorang patih (mangkubumi) yang membuat Daendels marah dengan tindakannya yang berani dan tegas.

Penulis membahas mengenai bentuk konflik dan perlawanan yang dilakukan Mangkubumi Wargadireja dalam menentang keputusan Daendels dalam pembangunan pangkalan armada perang. Selama penulis mencari-cari tahu tentang Mangkubumi Wargadireja. Penulis menemukan beberapa penelitian yang berbentuk buku yang membahas tentang Mangkubumi Wargadireja. Penulis menemukan beberapa sumber buku, jurnal, hingga arsip yang membahas kepada tokoh ini beserta konflik sejarahnya. Namun penulis menjadikan buku dan arsip sebagai sumber utamanya. Ada tujuh referensi utama, diantaranya adalah:

1. Buku yang ditulis oleh Djoko Marihandonodan Harto jowono yang berjudul “Perlawanan rakyat Banten melawan imperialisme kepahlawanan Pangeran Mangkubumi Wargadireja”, Buku ini membahas tentang perlawanan rakyat Banten dan Mangkubumi Wargadireja yang protes terhadap kesewenang-wenangan Daendels selaku Gubernur jenderal

---

<sup>17</sup> Wahyuni, “Identifikasi Pola Psikologi Komunikasi Resisten Dalam Masyarakat”, *Media Kajian Komunikasi Islam : Jurnal Peurawi*, Vol.1. No.1. (Tahun 2018), p. 7.

Hindia Belanda. Di mana di buku ini menjelaskan apa yang terjadi pada abad ke-19. Relevansi dari karya tersebut dengan objek yang dibahas sama yaitu sama-sama membahas tentang Mangkubumi Wargadireja yang membedakan hanya dari segi pembahasannya saja bahwa penulis memfokuskan di bagian konflik dengan Daendels karena adanya perbedaan kepentingan yang berlatar di Ujung Kulon yaitu Teluk Meeuwen.

2. Buku yang ditulis oleh Tubagus Najib yang berjudul “Kebangkitan kembali Banten dari masa ke masa berdasarkan manuskrip dan tinggalan arkeologis” diterbitkan di kota Serang, penerbit Sengpho Utama pada tahun 2008. Di dalam buku ini membahas tentang kekejaman Daendels dalam pemerintah pada saat kerja paksa, pembuatan Armada angkatan laut Belanda yang semula dibangun di Ujung Kulon namun kemudian pindah ke Anyer karena sudah ada perlawanan dari pihak rakyat akan tetapi proyek ini pun tidak pernah selesai sampai Daendels meninggalkan Indonesia buku ini masih relevan dengan judul yang dibahas walaupun tidak menjelaskan peran Mangkubumi Wargadireja secara detail namun buku ini menjelaskan secara garis umumnya saja meskipun begitu namun buku ini tetap relevan.
3. Buku yang ditulis oleh Ota Atsushi yang berjudul “Perubahan Regim dan Dinamika Sosial di Banten: Masyarakat, Negara, dan Dunia Luar Banten 1750-1830”, buku ini membahas

tentang yang terjadi di Kesultanan Banten yang dimulai tahun 1750, pada saat Belanda memerintah hingga pada perubahan Rejim ke Inggris, hingga keruntuhan dari Kesultanan Banten dan juga perlawanan serta Gerakan sosial dari para rakyat Banten.

4. Buku yang ditulis oleh Nina H. Lubis yang berjudul “Banten dalam Pergumulan Sejarah” buku ini membahas tentang sejarah Banten dari masa prasejarah hingga pembentukan Provinsi Banten. Buku ini juga menjelaskan tentang penjajahan yang Belanda lakukan di Kesultanan Banten.
5. Buku yang ditulis oleh Angga Indrawan yang berjudul “Napak Tilas Jalan Daendels” buku ini membahas tentang perjalanan Daendels Ketika diutus untuk datang ke Pulau Jawa hingga ia memutuskan untuk membuat infrastruktur di negara jajahannya, meliputi daerah Banten-Panarukan.
6. Buku yang ditulis oleh tim laporan jurnalistik yang berjudul “Ekspedisi Anjer-Panaroeakan” buku ini membahas tentang jalan Anyer-Panarukan, kemudian perlawanan yang dilakukan Sultan Surosowan terhadap Daendels.

Dari beberapa sumber relevan diatas, pada penelitian ini topik yang menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya adalah dari segi konflik pembangunan pangkalan armada perang, poin yang akan di tekankan oleh penulis. Maka dari itu, hasil penelitian mengenai “Konflik Mangkubumi Wargadireja dengan Daendels dalam pembangunan pangkalan armada perang di Teluk Meeuwen di

Banten Selatan tahun 1808”, sehingga atas dasar ini penulis mencoba untuk menelusuri lebih dalam mengenai konflik yang terjadi antara Mangkubumi Wargadireja terhadap Daendels dalam pembangunan pangkalan armada perang di Teluk Meeuwen.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Teori yang menjadi acuan penelitian ini adalah teori konflik karya dari Lewis A. Coser, bahwa Coser membedakan konflik yang realistis dari yang tidak realistis, konflik yang realistis berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditunjuk pada objek yang dianggap mengecewakan. Lewis A Coser juga mengemukakan teori konflik dengan membahas tentang permusuhan dalam hubungan-hubungan sosial yang intim.<sup>18</sup>

konflik juga mengandung arti pertengkaran, perkelahian, perselisihan tentang pendapat atau keinginan atau perbedaan. Jadi, konflik adalah pertentangan secara terbuka antara individu-individu atau kelompok yang ada di masyarakat atau bangsa-bangsa.<sup>19</sup>

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya menyangkut ciri fisik, kepandaian,

---

<sup>18</sup> Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, (Bandung: Refika Aditama, 2009) p. 184.

<sup>19</sup> M. Wahid Nur Tualeka, “*Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern*”, *Jurnal Al-Hikmah*, vol.3, No.1 (Januari 2017), p. 34.

pengetahuan, adat istiadat, keyakinan dan lainnya. Konflik bertentangan dengan integrasi. Konflik dan integrasi berjalan sebagai sebuah siklus di masyarakat. Konflik yang terkontrol akan menghasilkan integrasi. Sebaliknya integrasi yang tidak sempurna akan menciptakan konflik.<sup>20</sup>

Seperti di jurnal karya M. Wahid Nur Tualeka yang berjudul “Teori Konflik Sosiologi Klasik dan Modern” bahwa teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemikiran sarana-sarana produksi sebagai unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat.

Konflik khususnya di Banten sudah dimulai jauh ada sebelum penjajahan. Namun, konflik sering terjadi dan lebih hebat setelah datangnya kolonialisme Eropa. Kesultanan Banten sendiri memiliki sejarah konflik yang sering terjadi, yang melibatkan agama, politik, etnis dan lainnya. Konflik lebih sering dan kompleks terjadi pada saat di masa-masa kemunduran Kesultanan Banten.

Coser menggambarkan konflik sebagai perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan yang berkenaan dengan status, kekuasaan, dan sumber-sumber kekayaan yang dari persediannya

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan teori Konflik dalam perkembangan Sosiologi*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1988), p.7.

tidak mencukupi. Coser menyatakan perselisihan atau konflik dapat berlangsung antar individu, kumpulan, atau antara individu dan kumpulan. Menurut Coser konflik juga merupakan unsur interaksi yang penting sama sekali tidak boleh dikatakan bahwa konflik selalu tidak baik atau memecah belah atau merusak. Konflik bisa juga mempererat hubungan antar anggota seperti menghadapi musuh bersama dan bisa memunculkan solidaritas dan ketertiban, hingga membuat orang lupa akan perselisihan internal mereka sendiri.<sup>21</sup>

Alasan terjadinya konflik tersebut tidak hanya masalah biasa, tapi juga disebabkan oleh faktor sosio-politik yang sulit, sehingga melibatkan para pimpinan formal dan informal. Salah seorang tokoh dari Kesultanan Banten yaitu Mangkubumi Wargadireja adalah mangkubumi dari Kesultanan Banten pada masa Sultan Ishak Zainal Muttaqien. Karena, Mangkubumi Wargadireja protes tentang ketidaksetujuannya dalam kerja paksa atau Kerja Wajib di daerah Ujung Kulon, kemudian membuat marah Daendels dan menantang dengan membunuh utusan Daendels. Faktor, diantaranya adalah adanya penindasan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan Daendels dan para kolonial dalam kerja paksa atau kerja Rodi.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian sejarah adalah suatu kumpulan yang sistematis dari prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang dimaksudkan untuk membantu dengan secara efektif dalam

---

<sup>21</sup> Digilib.uinsa.ac.id (diakses pada tanggal 11 November 2023)

pengumpulan bahan-bahan sumber dari sejarah, dalam menilai atau menguji sumber-sumber itu secara kritis, dan menyajikan suatu hasil “*sinthese*” dari hasil-hasil yang dicapai.<sup>22</sup> Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah, yakni suatu langkah atau cara merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan, mengkritik, menafsirkan. Menurut Sartono Kartodirjo, jika ilmu sejarah ingin berkembang maka sejarah harus melakukan pendekatan multidimensional dengan bantuan ilmu-ilmu sosial yang terus berkembang.<sup>23</sup>

Penulis menggunakan teknik pendekatan sejarah dan kajian literature, dalam penelitian sejarah, mempunyai lima tahap, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi (kritik sejarah keabsahan sumber), interpretasi dan sintesis, dan penulisan. Penelitian historis sebenarnya sangat bergantung kepada data yang diobservasi orang lain daripada data yang diobservasi peneliti sendiri. Data atau fakta yang baik berasal dari hasil yang cermat engan menganalisa keotentikan, ketepatan, dan juga pentingnya sumber-sumber. Berikut ini adalah urutan-urutan dari metode penelitian sejarah:

### **1. Pemilihan Topik**

Topik yang penulis pilih dari berbagai topik adalah Konflik Mangkubumi Wargadireja terhadap Daendels dalam

---

<sup>22</sup> Wasino dan Endah Sri Hartatik, *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan Cet 1*, (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2018), p.11.

<sup>23</sup> Muhamad Nandang Sunandar, *Pengantar Historiografi*, (Serang: Media Madani, 2021), p. 5.



Pembangunan Pangkalan Armada Perang di Teluk Meeuwen Tahun 1808-1810. Alasan mengapa memilih topik ini karena penulis merasa tertarik dengan perjuangan tindakan Mangkubumi Wargadireja yang membela rakyatnya dari Kerja Rodi yang merugikan rakyat Banten pada masa itu. Walaupun Mangkubumi Wargadireja terbunuh di tangan Daendels pada saat itu juga. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengambil topik tersebut.

## 2. Pengumpulan Sumber (*Heuristik*)

Sumber sejarah disebut juga data sejarah, dalam bahasa Inggris biasa di sebut *datum* (dalam bentuk tunggal) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan di tulis. Sumber itu bisa dapat di bagi menjadi dua yaitu sumber tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen atau artefak.<sup>24</sup>Penulis mengumpulkan sumber sejarah berupa dokumen tertulis dalam bentuk buku, arsip berbahasa Belanda dan Melayu, jurnal, makalah dan juga internet.

Tahapan heuristik ini, penulis mengadakan studi pustaka diantaranya penulis memasukkan sumber primer hanya ada dua dokumen tertulis yaitu dokumen Belanda mengenai lampiran Daendels di Banten yang berjudul “*Organique Stukken*”, diterbitkan di Gravenhag pada tahun 1814, dan *Nederlandsch Indie Plakaatboek zetiende deel 1810-1811*, diterbitkan di Amsterdam pada tahun 1897.

---

<sup>24</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, p. 73.

### 3. Kritik (*Verifikasi*)

Kritik yaitu meneliti atau menyelidiki keaslian sumber yang telah dicari dan dikumpulkan. Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengklasifikasian dan penyaringan terhadap sumber-sumber yang berhasil didapatkan.<sup>25</sup> Penilaian atau pengujian terhadap bahan-bahan sumber tersebut dari sudut pandangan nilai kenyataan (kebenarannya) semata-mata, tahap kedua ini disebut kritik sumber atau *kritisisme*, yang merupakan langkah yang sangat penting sehingga sering dikatakan bahwa seluruh proses dari metode sejarah di sebut *Kritisisme Sejarah*.

Menilai atau menguji bahan-bahan sumber dan kritik luar dan kritik dalam untuk menentukan atau menetapkan otentitas kebenaran, kesahihan, kesejatan dari bahan-bahan sumber sebelum digunakan di dalam penelitian (kritisisme).<sup>26</sup> Tahap kritik ini, penulis membandingkan isi sumber dengan karya lain yang terkait dengan penelitian untuk memperoleh data yang logis.

### 4. Interpretasi

Interpretasi adalah menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau

---

<sup>25</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, p. 73.

<sup>26</sup> Wasino, *Metode Penelitian Sejarah*, p. 12.

memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa.

Dengan demikian, setelah kritik selesai maka langkah berikutnya adalah melakukan interpretasi atau penafsiran dan analisis terhadap data yang diperoleh dari berbagai sumber.<sup>27</sup>

Tahap ini, penulis melakukan interpretasi (menafsirkan) sumber yang sudah di kritik. Prosesi ini dilakukan dengan menganalisa fakta-fakta yang diperoleh, yaitu mengenai Konflik Mangkubumi Wargadireja dengan Daendels dengan cara menguraikan dan menyatukan sumber-sumber yang di dapat untuk disusun sebagai fakta sejarah.

## **5. Historiografi**

Secara bahasa kata “historiografi” merupakan gabungan dari dua kata, yaitu history atau historio yang berarti sejarah, dan grafi yang berarti deskripsi atau penulisan. Sebagaimana sejarah adalah masa lampau manusia baru mempunyai makna yang berarti apabila masa lampau manusia baru mempunyai makna yang berarti apabila masa lampau itu memiliki dimensi waktu.<sup>28</sup>

Penulisan adalah usaha rekonstruksi hari lampau untuk menjawab pertanyaan pokok yang telah dirumuskan. Akan tetapi, penulisan tanpa kesaksian dan pembuktian. Hal ini pula berarti metode sejarah tidak dapat dipisahkan dari

---

<sup>27</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, p. 73.

<sup>28</sup> Imas Emalia, *Historiografi Indonesia Sejak Masa Awal Sampai Masa Kontemporer*, (Ciputat: UIN Jakarta Press, 2006), p.6.

historiografi, maka jelaslah bahwa historiografi adalah bagian dari metode sejarah.<sup>29</sup> Historiografi adalah penulisan sejarah, agar menjadi karya yang layak untuk diajukan, hasil penelitian mengenai konflik Mangkubumi Wargadireja terhadap Daendels diupayakan sebaik mungkin dengan disusun secara sistematis dan kronologis.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan ini, penulis membagi ke dalam lima bab yang masing-masing terdapat beberapa sub yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut. Berdasarkan pedoman pembuatan karya ilmiah pembahasan penulisan ini akan disistematiskan menjadi lima bab, yaitu :

**BAB I PENDAHULUAN** yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Pustaka, , Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

**BAB II PEMBAHASAN** di bab II mengenai Biografi Mangkubumi Wargadireja, yaitu mencakup tentang Riwayat Keluarga Mangkubumi Wargadireja, Menjabat menjadi Mangkubumi, Pandangan Politik Mangkubumi Wargadireja terhadap Belanda.

---

<sup>29</sup> Nina H. Lubis, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2020), p. 4.

**BAB III PEMBAHASAN** di bab III mengenai Pembangunan Pangkalan Armada Perang di Teluk Meeuwen, yaitu mencakup tentang Kedatangan Daendels ke Banten Selatan, Alasan di Bangunnya Pangkalan Armada Perang di Teluk Meeuwen, Proyek Pembangunan Infrastruktur Pertahanan di Ujung Kulon.

**BAB IV PEMBAHASAN** di bab IV mengenai Konflik Mangkubumi Wargadireja dengan Daendels dalam pembangunan pangkalan armada perang tahun 1808, yaitu mencakup tentang Faktor Penyebab Konflik Mangkubumi Wargadireja terhadap Daendels Tahun 1808-1809, Tindakan Daendels Menghancurkan Keraton Surosowan, Dampak Setelah Kematian Mangkubumi Wargadireja Tahun 1810.

**BAB V PENUTUP** di bab V adalah Penutup meliputi, kesimpulan dan saran-saran.